

**DAMPAK PEMERINTAH REVOLUSIONER REPUBLIK INDONESIA
(PRRI) TERHADAP PSIKOLOGIS MASYARAKAT MINANGKABAU
DI KOTA BUKITTINGGI SETELAH TAHUN 1958**

TESIS



Oleh

**MUHAMMAD IHSAN KARMEDI
NIM. 19161027**

**Ditulis untuk memenuhi persyaratan
dalam mendapatkan gelar Magister Pendidikan**

**KONSENTRASI PENDIDIKAN SEJARAH
PROGRAM STUDI ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2021**

ABSTRACT

Muhammad Ihsan Karmedi. 2021. The Impact of the Revolutionary Government of the Republic of Indonesia (PRRI) on the psychology of the Minangkabau Society in Bukittinggi After 1958. Thesis. Graduate Program of Universitas Negeri Padang.

This study discusses how the impact of the Revolutionary Government of the Republic of Indonesia (PRRI) on the psychology of the Minangkabau community in Bukittinggi after 1958. The existence of the PRRI movement made the psychology of the Minangkabau community in Bukittinggi, who was originally so brave to oppose the central government, become weak due to the stigma as 'ethnic rebels' from central government. The aims of this study were (1) to find out the situation of Bukittinggi before PRRI, (2) to find out the situation of Bukittinggi during PRRI, (3) to find out the situation of PRRI, and (4) to find out the impact of PRRI on the Minangkabau people's psychology in Bukittinggi.

The method used on this study is the historical research method which consists of 4 steps, the first is heuristic, the author tries to collect data both primary and secondary data. The two sources of criticism are criticism in terms of internal and external. Third, interpretation, namely providing an interpretation of the sources or facts that have been found, and the fourth historiography, at this stage the author assembles the existing data and facts so that they become a meaningful writing.

The results of this study are first, the Minangkabau people in Bukittinggi did not have the slightest fear when PRRI made the city of Bukittinggi their military command center, instead they were ready to support this movement by becoming a second-tier army for the youths even though they had no previous military experience. This was because the Minangkabau people in Bukittinggi were so nervous about the Soekarno government absorbing regional wealth for their benefit and allowing the Indonesian Communist Party (PKI) to develop its ideology. Second, when PRRI was in turmoil, the community supported the needs for PRRI soldiers, such as food and so on. In dealing with APRI soldiers, PRRI soldiers were supported by weapons from the United States such as Bazooka and Garrand weapons. People who did not participate in fighting tried to save themselves to other areas. Third, after the PRRI ended, the OPR an organization affiliated with the PKI, carried out acts of terror against PRRI sympathizers and former PRRI soldiers in Bukittinggi. Fourth, the PRRI movement had the impact of psychological degradation on the Minangkabau community in Bukittinggi, who were originally so brave that they felt humiliated due to the stigma as 'ethnic rebels' from the central government, to avoid this, they even carried out an exodus (relocation) to other areas. However, there are some of them who always adhere to the Minang philosophy, namely the Basandi Syarak custom, the Kitabullah Basandi Syarak.

ABSTRAK

Muhammad Ihsan Karmedi .2021. Dampak Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) terhadap Psikologis Masyarakat Minangkabau di Bukittinggi Setelah Tahun 1958. Tesis. Pascasarjana Universitas Negeri Padang

Penelitian ini membahas bagaimana dampak Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) terhadap Psikologis Masyarakat Minangkabau di Bukittinggi setelah tahun 1958. Adanya gerakan PRRI membuat Psikologis Masyarakat Minangkabau di Bukittinggi yang semula begitu berani menentang pemerintah pusat berubah menjadi lemah dikarenakan pemberian stigma sebagai ‘etnis Pemberontak’ dari Pemerintah Pusat. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui situasi Kota Bukittinggi sebelum PRRI, (2) untuk mengetahui situasi Kota Bukittinggi ketika PRRI, dan (3) untuk mengetahui dampak PRRI terhadap Psikologis Masyarakat Minangkabau di Bukittinggi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Sejarah yang terdiri dari 4 langkah, yang pertama heuristik, penulis berusaha mengumpulkan data baik itu data primer dan sekunder. Kedua kritik sumber yaitu pengkritikan dari segi intern maupun ekstern. Ketiga, interpretasi yaitu memberikan penafsiran terhadap sumber atau fakta yang telah ditemukan, dan yang keempat Historiografi, pada tahap ini penulis merangkai data dan fakta yang ada tersebut sehingga menjadi sebuah tulisan yang bermakna.

Hasil penelitian ini adalah *Pertama*, sebelum terjadinya PRRI, masyarakat etnis Minang di Bukittinggi begitu marah dengan tindakan pemerintah pusat yang mengeruk kekayaan daerah hanya untuk kepentingan pusat sehingga menjadi awal pergolakan dari daerah, dan juga membiarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) mengembangkan ideologinya. *Kedua*, ketika PRRI bergejolak, masyarakat minang di Bukittinggi menyokong kebutuhan untuk tentara PRRI, seperti pangan dan lain sebagainya. Dalam menghadapi tentara APRI, tentara PRRI disokong oleh senjata dari Amerika Serikat seperti senjata Bazoka dan Garrand. Masyarakat yang tidak ikut bertempur berusaha menyelamatkan diri ke daerah lain. *Ketiga*, setelah PRRI usai, OPR organisasi yang terafiliasi dengan PKI melakukan aksi teror kepada simpatisan PRRI dan bekas tentara PRRI di Bukittinggi gerakan PRRI memberikan dampak degradasi psikologis bagi masyarakat Minangkabau di Bukittinggi, yang semula begitu berani menjadi perasaan terhina akibat pemberian stigma sebagai ‘etnis Pemberontak’ dari pemerintah pusat serta keterpurukan ekonomi, untuk menghindari hal itu, mereka bahkan melakukan eksodus (perpindahan) ke daerah lain. Kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah pergolakan PRRI memberikan dampak psikologi yang dialami oleh etnis Minang di Bukittinggi setelah tahun 1958.

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

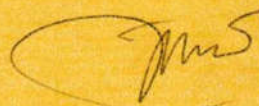
Nama Mahasiswa : **Muhammad Ihsan Karmedi**
NIM. : 19161027

Nama

Tanda Tangan

Tanggal

Dr. Erniwati, M.Hum.
Pembimbing



Direktur Pascasarjana
Universitas Negeri Padang,



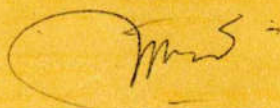
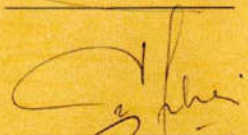
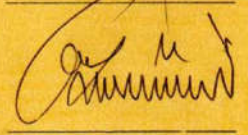
Prof. Yenni Rozimela, M.Ed., Ph.D.
NIP. 19620919 198703 2 002

Koordinator Program Studi,



Prof. Dr. Agusti Efi, M.A.
NIP. 19570824 198110 2 001

PERSETUJUAN KOMISI
UJIAN TESIS MAGISTER PENDIDIKAN

No	N a m a	Tanda Tangan
1.	<u>Dr. Erniwati, M.Hum.</u> (Ketua)	
2.	<u>Azmi Fitriasia, M.,Hum., Ph.D.</u> (Sekretaris)	
3.	<u>Dr. Ofianto, M.Pd.</u> (Anggota)	

Mahasiswa :

Nama : **Muhammad Ihsan Karmedi**
NIM. : 19161027
Tanggal Ujian : 10 November 2021

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis tesis dengan judul Dampak Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia terhadap psikologis Masyarakat Minangkabau di Kota Bukittinggi setelah tahun 1958 adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik Universitas Negeri Padang maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan pembimbing Ibu Dr. Erniwati, M. Hum, dan Kontributor Azmi Fitrisia, M. Hum., Ph. D, dan Dr. Ofianto, M. Pd.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah penulis atau publikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, Februari 2022

Saya yang menyatakan



Muhammad Ihsan Karmedi
NIM. 19161027

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan pada Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan Tesis ini, Sholawat beriring salam penulis doakan agar tetap tercurah kepada suri tauladan kita, umat manusia yakni Nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau kita dapat menikmati agama Islam sampai saat sekarang ini, sebagai agama yang benar. Adapun di antara nikmat Allah yang penulis rasakan saat sekarang ini adalah selesainya penulisan Tesis ini dengan judul **“Dampak Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia Bagi Psikologis Masyarakat Minangkabau di Kota Bukittinggi setelah 1958.”**

Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari banyak sekali menghadapi kesulitan di dalamnya, semua itu terjadi karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, di samping itu penulis juga banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Direktur pasca sarjana Universitas Negeri Padang Prof. Yenni Rozimela, M.Ed., Ph.D
2. Koordinator Program Studi Prof. Dr. Agusti Efi M.A
3. Ibu Dr. Erniwati, M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penulisan tesis ini.
4. Ibu Azmi Fitrisia, M.Hum Ph.D dan Pak Dr Ofianto M.Pd selaku Dosen penguji
5. Seluruh dosen Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu, pengetahuan kepada penulis
6. Seluruh civitas akademika Pascasarjana Universitas Negeri Padang
7. Para informan yang telah memberikan informasi berharga untuk penulisan tesis ini
8. Teman-teman Program Pascasarjana BP 19

9. Kedua Orang tua yang penulis sayangi dan kedua adik-adikku yang penulis sayangi

Penulis mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penulisan tesis ini. Segala bentuk kritikan dan saran untuk kesempurnaan tesis ini penulis terima dengan terbuka. Dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan karya ini semoga bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Februari 2022

Penulis,

Mhd. Ihsan Karmedi
NIM. 19161027

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN AKHIR TESIS	iii
PERSETUJUAN KOMISI UJIAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan pemecahan masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 11
A. Teori Penelitian	11
B. Penelitian yang Relevan	32
 BAB III: METODE PENELITIAN	 41
A. Metode Penelitian	41
B. Perolehan Data	42
C. Informan Penelitian	44
D. Sumber Penelitian	45
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Analisa Data	48

BAB IV HASIL PENELITIAN	51
A. Temuan Umum	51
1. Keadaan alam dan Geografis Kota Bukittinggi	51
2. Sejarah kota Bukittinggi	56
3. Penduduk Kota Bukittinggi	62
B. Temuan Khusus.....	66
1. PRRI di Sumatera Barat	66
2. Hubungan PRRI dengan kondisi politik di Sumatera Barat	95
3. Pergolakan PRRI di Bukittinggi	98
a. Bukittinggi Sebelum PRRI	98
b. Bukittinggi Ketika PRRI	102
c. Dampak PRRI Bagi Psikologis Etnis Minang di Bukittinggi	115
BAB V PENUTUP	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	123
C. Rekomendasi	124
DAFTAR PUSTAKA	125

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Kelompok-kelompok yang Saling Bertentangan	71
Tabel 4.2 : Daftar Walikota Bukittinggi yang Memerintah Dari Tahun 1945-1966	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.2 : Monumen Pendidikan Opsir Divisi XI Banteng	114
---	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) belum usai. Bebas dari belenggu penjajahan bangsa asing seperti Belanda dan Jepang bukan berarti Indonesia dengan mulus dapat menjadi Negara yang damai dan aman. Justru, dimulainya babak baru bagi NKRI juga menjadi awal bagi lahirnya berbagai konflik di dalam tubuh NKRI sendiri. Dengan demikian, bangsa Indonesia yang sudah bebas dari penjajahan bangsa Barat, masih harus bertikai dan menghadapi “penjajah” dari dalam negeri. Penjajah yang dimaksud di sini adalah para pemberontak yang melakukan makar terhadap pemerintah pusat. Ada banyak sekali latar belakang dan penyebab munculnya para pemberontak ini. Mulai dari ketidaksetujuan para penguasa (pemerintah pusat), merasa dimarginalkan oleh pemerintah, hingga alasan ingin mendirikan Negara sendiri dan membuat Negara Islam. Nah, dari sinilah di dalam tubuh Indonesia muncul banyak para gerakan pemberontakan yang dikenal dengan gerakan separatis.¹

Istilah Separatis atau separatisme ditujukan pada tindakan seseorang atau sekelompok orang atau komunitas yang berada dalam satu kesatuan besar yang hendak memisahkan diri atau keluar dari komunitas atau kesatuan besar

¹Rizem Aizid, 2013, *Para Pemberontak Bangsa*, (Yogyakarta: Palapa), hal 5-6

itu dengan maksud berdiri sendiri sebagai Negara atau bangsa merdeka. Orang-orang yang terlibat di dalamnya disebut kaum *separatist*.

Tujuan memisahkan diri untuk menjadi Negara merdeka lepas dari Negara induknya dalam berbagai literature hukum internasional pada hakekatnya hanya merupakan salah satu tujuan dari pemberontakan yang terjadi suatu Negara. Adapun tujuan pemberontakan yang lain adalah untuk menggulingkan pemerintah yang sah dan menggantikannya dengan pemerintahan yang baru sesuai keinginan kaum pemberontak, ataupun untuk bergabung dengan Negara lain (*integration*), atau kemungkinan yang lain adalah untuk menuntut otonomi yang lebih luas.

Apapun tujuan dan tujuan kaum pemberontak termasuk di dalamnya kaum *separatist*, merupakan perbuatan yang melanggar hukum nasional negara tempat terjadinya pemberontakan tersebut. Hal ini dikarenakan perbuatan pemaksaan kehendak kepada pemerintah yang sah dalam rangka mencapai tujuan yang diyakininya. Di atas semuanya itu, tuntutan untuk memisahkan diri dari negara induknya tentu merupakan ancaman terhadap integritas suatu negara.

Indonesia telah banyak menghadapi gerakan-gerakan pemberontakan yang terjadi di beberapa daerah, salah satunya adalah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). PRRI merupakan sebuah gerakan yang dilatarbelakangi oleh rasa ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat dalam pembangunan serta pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Jakarta) yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958

dengan keluarnya ultimatum dari dewan perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein di Padang, Sumatera Barat. Gerakan ini mendapat sambutan dari Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah yang mendukung gerakan PRRI dan menamakan dirinya sebagai Permesta.²

Konflik ini sangat dipengaruhi oleh tuntutan pemberlakuan otonomi daerah yang lebih luas. Ultimatum ini bukan tuntutan pembentukan Negara baru atau pemberontakan, tetapi merupakan protes bagaimana konstitusi Negara dijalankan. Di saat bersamaan kondisi Negara belumlah stabil pasca agresi militer Belanda. Hal ini memberikan ketimpangan dalam pembangunan di berbagai daerah-daerah, terutama di luar pulau Jawa. Selain itu, berdirinya PRRI juga dilatarbelakangi oleh rasa ketidaksukaan terhadap presiden Soekarno yang memberikan angin terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI).³

Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada mulanya bukan suatu gerakan pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Gerakan ini mengambil wilayah Sumatera Tengah sebagai basis kekuatannya. Beberapa faktor yang melatari munculnya gerakan ini adalah karena:

1. Terjadinya penciptaan kesatuan militer Sumatera Tengah dari tingkat divisi menjadi Brigade.
2. Pengangkatan Ruslan Moljoharjo, seorang birokrat Jawa sebagai pejabat Gubernur.

²Idris Soewardi, *Perjalanan dalam Kelam: Senarai Kisah Pemberontakan PRRI* (Yogyakarta : Barandha Publishing) hal 72

³Majalah Tempo tahun 2003, hal 57-58

3. Sedikitnya anggaran pembangunan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah.
4. Semakin besarnya pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam pemerintahan Republik Indonesia.
5. Diberhentikannya beberapa komandan militer Daerah lain.
6. Pecahnya dwitunggal Soekarno-Hatta.⁴

Berbagai gejolak yang terjadi di berbagai daerah turut memicu terjadinya sebuah gerakan penentangan terhadap negara Republik Indonesia, yang ditandai dengan lahirnya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia yang diproklamkan pada tanggal 15 Februari 1958, gerakan ini meletus lima hari setelah Jakarta menolak tuntutan daerah yang diajukan lewat “*Piagam Palembang*”.⁵ Gerakan ini kemudian meluas karena mendapat dukungan hampir dari semua komponen masyarakat Sumatera Barat.

Gerakan PRRI meluas hingga ke Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Walaupun dipelopori oleh tokoh militer, namun yang tergabung di dalamnya banyak yang berasal dari sipil yang terdiri dari tokoh agama, pelajar, politikus, pejabat, dan lainnya. Hal ini disebabkan karena telah terjadi polarisasi politik di pemerintahan Soekarno.⁶ Sentimen etnis dan agama juga menjadi latar belakang munculnya ketidakpuasan pemerintah di daerah,

⁴Eni May, *Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia dan gagalnya Penerapan Sistem otonomi daerah di Sumatera Barat 1956-1961*, Laporan Penelitian Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas

⁵Mestika Zed dan Hasril Chaniago, *Perlawanan Seorang Pejuang Biografi Kolonel Ahmad Husein*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hal., 274

⁶Eni May, *op. cit.*, hal 8

terutama Sumatera Barat. Akan tetapi tidak masalah ini tidak dipandang sebagai hitam-putih seperti di daerah Darul Islam. Berbagai persoalan itu hanyalah persoalan yang datang belakangan dan membuat situasi semakin memanas. Permasalahan utama hingga terjadinya gerakan PRRI merupakan ketidakpuasan pemerintah daerah yang telah bertahun-tahun dipendam kepada pemerintah pusat. Tidak adanya pembuktian sistem desentralisasi menumbuhkan mosi tidak percaya lagi kepada pemerintah Pusat.

Mestika Zed mengatakan bahwa “PRRI tak bermaksud “mendirikan negara dalam negara”. tetapi suatu pemerintahan tandingan dalam keadaan darurat, sebagai suatu gerakan protes terhadap kebijaksanaan Soekarno yang tidak adil akibat ketimpangan antara pusat dan daerah dan keperpihakan Soekarno pada komunis”.⁷ Senada dengan hal diatas, sebagaimana yang dikutip dari Surat Kabar Haluan” gerakan daerah yang kita lakukan sekarang ini adalah Islah atau koreksi total pemerintah pusat yang telah jauh menyeleweng dan menyimpang dari jalan yang sewadjarnya”.⁸

Namun, jauh sebelum itu, krisis politik memicu lahirnya gerakan PRRI. Krisis politik yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1956 dimulai dengan munculnya beberapa dewan dalam tubuh Angkatan Darat mencapai puncaknya pada tahun 1958 dengan adanya peristiwa PRRI-Permesta. Kalangan militer (AD) sangat menyesalkan jatuhnya kabinet Boerhanuddin Harahap seklaigus mengkhawatirkan cara jatuhnya kabinet. Hal ini dikarenakan hubungan antara Angkatan Darat dengan kabinet Burhanuddin

⁷*Ibid*, hal., 272-273

⁸Lebih lanjut lihat di Surat Kabar Haluan, 3 Juni 1957, hal.,1

telah terjalin hubungan yang baik. Sementara terpilihnya kabinet Ali untuk yang kedua kalinya telah mengecewakan pihak militer.⁹

Kondisi perekonomian yang tidak stabil juga dianggap menjadi salah satu penyebab berdirinya PRRI-Permesta. Kondisi politik dan Ekonomi yang tidak stabil berdampak pada terselenggaranya pembangunan dan pemerintahan yang baik. Daerah menuduh pusat hanya mementingkan kepentingannya sendiri, terlalu birokratis dan sentralistis. Pusat hanya menyedot dana dari daerah tapi tidak dipergunakan untuk membangun daerah. Sehingga di daerah muncul beberapa dewan di antaranya Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara.¹⁰

Kota Bukittinggi sebagai kota yang pada tahun 1948 pernah memainkan peran penting sebagai ibukota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) ternyata tak luput dalam peristiwa PRRI ini. Daerah Sumatera Tengah telah memimpin perjuangan untuk kemerdekaan di Sumatera, dengan gubernur dan komandan militer pindah ke Bukittinggi, dengan semua partai politik di Bukittinggi, jadi Bukittinggi atau Sumatera Barat adalah pusat komando perjuangan. Dan ketika komando ini tidak lagi berguna untuk memimpin perjuangan melawan Belanda, komando Banteng yang dibubarkan. Komando Bukit Barisan (Tentara Territorial I) di utara dan komando Sriwijaya di selatan (TT II), keduanya menjadikan Sumatera Barat

⁹Sapti Eka Pratiwi, *Pembubaran Partai Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin*, Avatara, e-journal Pendidikan Sejarah Volume 4 No, 3, Oktober 2016

¹⁰*Ibid.*

sebagai pusat mereka-tidak dibubarkan. Ini adalah bahan bakar yang memicu konfrontasi dengan pusat dalam PRRI (pemberontakan 1958).¹¹

Adanya peristiwa PRRI yang menjadikan kota Bukittinggi sebagai pusat komando perjuangan membuat laju pertumbuhan penduduk di Bukittinggi dapat dikatakan stationer atau pernah mengalami penurunan. Hal ini secara umum menimpa Sumatera Barat sebagai akibat dari tekanan yang tak tertahankan sesudah pemberontakan PRRI. Banyak orang-orang berbondong-bondong merantau. Bukittinggi merupakan basis pemberontakan tersebut dan berlanjut dengan pengganyangan paham komunis, maka laju pertumbuhan penduduknya antara tahun 1961-1966 yaitu 0,65%. Persoalan ini ditambah lagi oleh faktor kesulitan ekonomi yang mulai terjadi di daerah ini pada akhir tahun 1960-an, yang berlanjut sampai pertengahan tahun 1970-an, sehingga banyak penduduk yang mencari kerja ke luar daerahnya.¹²

Peristiwa PRRI selain menimbulkan eksodus atau perpindahan ke daerah lain secara besar-besaran, juga menimbulkan dampak psikologis yang sangat besar bagi etnis Minang di Bukittinggi, yaitu adanya perasaan terhina dan dianggap sebagai orang yang kalah. Padahal Kota Bukittinggi dulu dikenal sebagai kota perjuangan bagi bangsa Indonesia dan pernah ditunjuk menjadi Ibukota Indonesia pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada masa kepemimpinan Sjafruddin Prawiranegara. Hal ini yang membuat etnis Minang yang semula dihinggapi rasa kebanggaan karena

¹¹Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan Menuju Integrasi, Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*, (Jakarta :Yayasan Obor Indonesia , 2005)hal 273

¹²Zul'Asri, *Dari Fort de Kock ke Bukittinggi: Perubahan simbol kota Berbudaya barat ke simbol kota berbudaya Minangkabau (1930-an – 1960-an)*. Laporan penelitian dosen muda Jurusan Sejarah Fakultas ilmu-ilmu sosial Universitas Negeri Padang 2006

kota Bukittinggi pernah memainkan peranan penting dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia berubah menjadi perasaan terhina ketika Bukittinggi menjadi pusat komando perjuangan PRRI.

Hal ini dibuktikan dengan kutipan dari tulisan Maiza Elvira yang menerangkan bahwa Bukittinggi sebelum PRRI memiliki kontribusi penting, yaitu sebagai tempat berdirinya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada tanggal 22 Desember 1948 oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara yang sebelumnya adalah Menteri Kemakmuran Republik. Didirikannya PDRI tersebut merupakan sebuah alternatif dalam upaya mempertahankan Indonesia jika sewaktu-waktu ibukota Republik di Pulau Jawa jatuh kembali ke tangan Belanda. 10 tahun kemudian, tepatnya tahun 1958 Bukittinggi menjadi pusat komando militer PRRI. Pemberontakan ini menyisakan kesan buruk bagi pemerintah terhadap wilayah Sumatera Barat, juga bagi Bukittinggi.¹³ Di dalam buku biografi Harun Zain karya Ahmad Yusra ketika Harun Zain pulang ke kampung halamannya di Sumatera Barat ia melihat bagaimana luluh lantaknya Sumatera Barat pasca PRRI dan orang-orang etnis Minang menjadi *muno* (lemah). Ketika menjadi Gubernur ia membangkitkan kembali semangat dan psikologis masyarakat Minang yang jatuh karena pergolakan PRRI.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Dampak Pemerintahan Revolusioner Republik**

¹³ Maiza Elvira, *Wajah Bukittinggi dan riwayat masa silam sebuah kota*, Analisis sejarah, volume 6 No.1, 2017

¹⁴ Ahmad Yusra, *Biografi Harun Zain Tokoh Berhati Rakyat*, (Jakarta : Gebu Minang) hal 211

Indonesia (PRRI) Bagi Masyarakat Minangkabau di Bukittinggi Setelah PRRI tahun 1958.

B. Fokus Penelitian dan Pemecahan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dimana PRRI dan dampak psikologis bagi masyarakat Minangkabau di Bukittinggi, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana situasi Kota Bukittinggi sebelum PRRI?
2. Bagaimana situasi Kota Bukittinggi ketika terjadinya PRRI?
3. Bagaimana dampak PRRI bagi psikologis masyarakat Minangkabau di Bukittinggi?

Batasan spasial dalam penelitian ini yaitu masyarakat Minangkabau di Kota Bukittinggi, sementara untuk batasan temporal yaitu setelah tahun 1958.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian dan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah: Mengetahui dampak PRRI bagi psikologis masyarakat Minangkabau di Bukittinggi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka ada beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian tentang Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan aspek psikologis bagi etnis Minangkabau di Bukittinggi yaitu:

1. Secara teoritis adalah untuk menambah pengetahuan penulis tentang bagaimana dampak PRRI terhadap psikologis etnis Minang di Kota Bukittinggi
2. Secara praktis adalah memberikan wawasan dan pengetahuan kepada khalayak luas tentang gerakan PRRI yang menimbulkan dampak psikologis bagi etnis Minang di Bukittinggi.
3. Dapat memperkaya wawasan sejarah lokal bagi Bukittinggi dan juga memperkaya sejarah Nasional Indonesia pada umumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Jauh sebelum PRRI diproklamasikan di Bukittinggi, masyarakat etnis Minang di Bukittinggi begitu gerah dengan adanya kabar bahwa Soekarno melakukan pemerasan kepada Pemerintah Daerah, pemerasan ini dalam artian menyerap kekayaan yang dimiliki daerah untuk memenuhi kebutuhan Pusat itu sendiri. Hal ini tentunya membuat pihak daerah merasa kekayaan mereka dikeruk habis oleh sesama mereka sendiri.

Inyiak Sofyan, yang merupakan mantan sekretaris legion Lembaga Veteran Republik Indonesia (LVRI) mengungkapkan bahwa Bukittinggi menjadi pusat komando militer dikarenakan kota ini memiliki fase sejarah yang cukup apik, yaitu pernah menjadi ibukota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Selain itu, masyarakatnya yang sudah sangat muak dan jengah dengan Pemerintah Pusat yang terlalu mementingkan diri sendiri dan gampang dipengaruhi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).

Ada sebuah fakta menarik yang penulis dapatkan ketika mewawancarai beliau, yaitu pada tanggal 26 Desember 1956, Kolonel Simbolon datang ke Bukittinggi dari Sumatera Utara, ia dikawal oleh Batalyon 311. Ia mengadakan rapat dengan para petinggi Dewan Banteng dan Dewan Garuda. Rapat ini memiliki tujuan mengambil alih pemerintahan pusat. Rapat ini memiliki dua kepentingan yaitu:

- 1) Rapat Sipil
- 2) Rapat Militer

Pergolakan PRRI di Bukittinggi selaku pusat komando militer PRRI membuat Etnis Minang di Bukittinggi telah merasakan banyak hal, yaitu gerakan PRRI mendapat dukungan dari masyarakat Bukittinggi dikarenakan pada masa itu PKI makin melebarkan kekuasaannya dan paham yang dimilikinya. Hal itu sangat bertentangan dengan apa yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, yaitu keislaman yang cukup kuat dan kental. Pemerintahan Soekarno yang otoriter, dictator, dan memeras kekayaan dari daerah luar pulau Jawa menjadi faktor terbentuknya PRRI. PRRI disebut sebagai “gerakan anti Jawa” dan membenci segala hal tentang pusat. Bukittinggi menjadi tempat yang sangat sentral karena Padang selaku ibukota PRRI diduduki oleh tentara Pusat.

Ketika PRRI bergolak di Bukittinggi, hampir seluruh masyarakat di Bukittinggi ikut menyokong gerakan ini. Sebagai bentuk dukungan, ada yang menyatakan diri menjadi tentara lapis kedua meskipun belum memiliki pengalaman di bidang militer sama sekali. Selain itu, bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan lebih seperti pangan, mereka memberikan subsidi pangan kepada tentara PRRI dalam menghadapi tentara APRI.

PRRI memberikan dampak psikis bagi etnis Minang di Bukittinggi, yaitu sebagai sarangnya kaum pemberontak dan terjadinya migrasi secara besar-besaran. Migrasi ini menjadikan pola pertumbuhan penduduk di Bukittinggi pada masa itu menurun. Stigma sebagai Etnis pemberontak telah

membuat hati Etnis Minang di Bukittinggi terkoyak-koyak, dan terhina. Mereka beranggapan bahwa pemerintah pusat seakan tidak mengetahui betapa besar kontribusi kota Bukittinggi yang pernah menyelamatkan kedaulatan Republik Indonesia pada masa Agresi Militer Belanda II dulu.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang penulis temukan melalui penelitian yang berkaitan dengan Dampak Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) terhadap psikologi Etnis Minang di Bukittinggi setelah tahun 1958, maka penulis menyarankan:

1. Indonesia merupakan negara dengan keragaman suku, agama, ras, dan etnis. Walaupun demikian, hal ini janganlah dianggap sebagai penghambat kemajuan bangsa ini. Justru semakin menguatkan rasa persatuan dan kesatuan sesuai dengan semboyan Bhinnekeka Tunggal Ika, artinya walaupun berbeda-beda tapi tetap satu.
2. Generasi-generasi muda perlu mengingat kontribusi para pahlawan dan pejuang dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan.
3. Kasus PRRI menjadi pelajaran yang sangat berharga dalam sejarah Indonesia karena peristiwa ini selain karena kecemburuan terhadap pemerintah pusat dalam pembangunan, juga karena kedekatan Soekarno terhadap PKI yang berusaha untuk mengacaukan Ideologi Pancasila sebagai ideology bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus tetap menjunjung tinggi ideologi pancasila sebagai ideology bangsa Indonesia.

4. Peperangan yang terjadi seperti PRRI terhadap pemerintah pusat menimbulkan dampak psikologis yang sangat luar biasa bagi siapa yang terlibat di dalamnya, baik itu pelaku maupun saksi. Karena hal itu akan terus diingat bagi siapa yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, peristiwa progresif ini jangan sampai terjadi kembali dan menjadi pengingat untuk generasi muda selanjutnya.
5. Pemerintah pusat sebagai dampuk tertinggi negara ini perlu memperhatikan kesejahteraan rakyat tidak hanya di Pulau Jawa saja tetapi juga di luar pulau Jawa. Peristiwa PRRI menjadi bukti nyata pemerintah pusat mengabaikan tuntutan pemerintah daerah.

C. Rekomendasi

Pergolakan yang dikaji di Kota Bukittinggi tahun 1958-1961 ini perlu dikaji dan digali lagi mengingat terbatasnya data yang ada untuk menginterpretasi sejarahnya. Perlu kiranya pemerintah sebagai stakeholder yang memiliki pengaruh agar penulisan kembali sejarah PRRI di Kota Bukittinggi bisa lebih dalam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aizid, Rizem, 2013. *Para Pemberontak Bangsa*, Yogyakarta : Palapa
- Erniwati dkk, 2007. *Budaya dan Pariwisata-study tentang Multikultural di Kota Bukittinggi*, Padang : CECTOS Universitas Negeri Padang 2007
- Kahin, Audrey, 2005. *Dari pemberontakan menuju integrasi, Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Kartodirdjo, Sartono, 1992, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam metodologi sejarah*, Jakarta : Gramedia
- Kota Bukittinggi dalam angka tahun 2006.
- Madjid, M Dien. 2014. *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*, Jakarta : Kencana
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syamdani. 2008. *PRRI: Pemberontakan atau Bukan?.* Yogyakarta: Media Pressindo.
- Suryanto. 2005. *Metode Penelitian Berbagai Alternatif Pendekatan*.Yogyakarta: Pustaka
- Sutopo.2006, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sugiyono. 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Elfabata.
- Zed, Mestika & dkk, 1998. *Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Zed, Mestika dan Hasril Chaniago, 2001. *Perlawanan seorang pejuang : Biografi kolonel Ahmad Husein*, Jakarta :Pustaka Sinar Harapan